

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA SOMONGARI,
KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO,
PROVINSI JAWA TENGAH**

Tesar Afianggit

NPP. 31.0484

*Asdaf Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: tesarafianggit123@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mutiar Fitri Dewi, S.Pd., M.Hum.

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP): *Tourism is a leading sector that contributes to state and regional income, as well as improving community welfare. The development of tourist villages is a strategic step for the government to maximize regional potential. Purworejo Regency is one of the areas in Central Java Province that is trying to develop tourist villages. Purpose:* The objectives of this research are to describe the implementation of Purworejo Regency Regulation Number 15 of 2019 concerning Tourism Villages in Somongari Village, Kaligesing District. In addition, this research also aims to identify supporting and inhibiting factors, as well as efforts made by the local government and village to overcome obstacles in the development of Somongari Tourism Village. **Method:** This research employs qualitative methods with a descriptive approach. It focuses on the implementation of development policies for the Somongari Tourism Village in Kaligesing District, utilizing the theory of Van Meter & Van Horn (1975). Data collection techniques include observation, interviews, and document analysis. Data analysis will involve data reduction, presentation, and conclusion drawing. **Result:** The research results reveal that the development of Somongari Tourism Village benefits from strong commitment and communication among policy implementers, as well as a high level of community awareness regarding tourism village development. However, several obstacles remain, including a lack of adequate and competent human resources, suboptimal management of village funds, and limited budgetary support for constructing essential facilities. **Conclusion:** Implementation of the Somongari Tourism Village Development Policy in Kaligesing District, Purworejo Regency, has generally gone well. However, there are obstacles such as a lack of understanding by policy implementers regarding Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning Tourism Villages, inadequate and competent Pokdarwis resources, as well as suboptimal management of village funds and minimal budget support for the construction of supporting facilities.

Keywords: *Implementation, Policy, Development, Tourism Village*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pariwisata merupakan sektor unggulan yang berkontribusi pada pendapatan negara dan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan desa wisata menjadi langkah strategis pemerintah dalam memaksimalkan potensi daerah. Kabupaten Purworejo adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berupaya mengembangkan desa wisata. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa dalam mengatasi hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Somongari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari di Kecamatan Kaligesing, menggunakan teori Van Meter & Van Horn (1975). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan Desa Wisata Somongari, para pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan komunikasi yang baik, serta masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam pengembangan desa wisata. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, pengelolaan dana desa yang belum optimal, dan minimnya dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas penunjang. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, secara umum sudah berjalan baik. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, sumber daya pokdarwis yang belum memadai dan kompeten, serta pengelolaan dana desa yang belum optimal dan minimnya dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas penunjang.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengembangan, Desa Wisata

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa besar dengan potensi pariwisata yang beragam, sehingga mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh karena itu, sektor pariwisata jika dikembangkan dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan negara dan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata Indonesia mengalami beberapa tren perubahan dari wisata massal menjadi wisata alternatif. Salah satu wisata alternatif yang menjadi tren di masyarakat adalah desa wisata.

Kabupaten Purworejo menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berupaya untuk meningkatkan pengembangan desa wisata. Desa Somongari adalah desa di Kabupaten Purworejo yang memiliki objek wisata seperti wisata sejarah *Memorial House W.R. Soepratman*, wisata budaya Festival Jolenan Somongari, agrowisata durian dan manggis, serta wisata alam Curug Silangit. Desa Somongari terletak di Kecamatan Kaligesing yang berada di kawasan strategis

nasional yakni berdekatan dengan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) dan berda di Kawasan Badan Otorita Borobudur (BOB) sehingga berpotensi mendatangkan wisatawan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kendala utama adalah kunjungan wisatawan yang belum stabil dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya promosi, lemahnya SDM dalam mengelola desa wisata, minimnya pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur, serta kurangnya penataan kawasan desa wisata. Para pelaksana kebijakan telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti pelatihan untuk pengelola desa wisata, promosi melalui media sosial, serta pembangunan jalan poros desa dan fasilitas umum di Curug Silangit. Namun, upaya tersebut belum berjalan dan belum dikelola secara optimal oleh masyarakat. Akibatnya, Desa Wisata Somongari masih kalah bersaing dengan destinasi wisata di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen. Pengembangan Desa Wisata Somongari harus terus dilakukan secara berkala, sehingga diperlukan keseriusan dari para pelaksana kebijakan. Upaya pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Purworejo, khususnya di Desa Somongari, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata. Dalam pasal 14 dijelaskan tentang pengembangan usaha pariwisata di desa wisata, yang mencakup usaha daya tarik wisata, usaha informasi wisata, usaha atraksi wisata, usaha akomodasi wisata dan kuliner, serta usaha kerajinan rakyat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks implementasi maupun pengembangan Desa Wisata. Penelitian pertama, yang menjadi referensi adalah penelitian oleh Eduardus Hirodias, Hermawan, dan Fadillah Amin (2022) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya di Kabupaten Manggarai Barat*. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter & Van Horn (1975) dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi beberapa aspek mendasar terkait kebijakan pengembangan destinasi pariwisata budaya di Manggarai Barat. Meskipun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata telah diimplementasikan, masih terdapat beberapa masalah mendasar yang menyebabkan proses implementasi tidak berjalan optimal dan tidak mencapai tujuan akhir kebijakan ini. Tujuan akhir tersebut adalah menciptakan daya tarik wisata budaya yang berkualitas dari segi destinasi dan jumlah wisatawan, sehingga mampu menjadi daya tarik wisata tambahan yang mendukung daya tarik utama yaitu Komodo. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan budaya dan sejarah masa lampau Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian kedua, oleh Merdina Megantari Gartiwi, R. Ira Irawati, dan Nina Karlina (2022) berjudul *Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Pangandaran*. Penelitian ini menggunakan teori Marilee Grindle yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel konten kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi (*policy context*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum efektifnya implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah Kabupaten

Pangandaran dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam konten kebijakan (*policy content*). Penelitian ketiga, dilakukan oleh Nurul Maulidiah dan Suci Megawati (2022) mengenai *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter & Van Horn (1975) dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BUMDes dalam pengembangan desa wisata belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang dimiliki BUMDes Sambimadu yang masih belum memadai dan kompeten. Karakteristik yang ditunjukkan oleh pegawai BUMDes adalah kesibukan dengan urusan masing-masing sehingga menganggap sepele tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, kemampuan kognitif mereka belum sepenuhnya memahami kebijakan BUMDes Sambimadu dalam pengembangan desa wisata. Di sisi lain, terdapat dukungan dari adanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan BUMDes Sambimadu, karena setiap minggu dilakukan evaluasi kegiatan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada proses implementasi kebijakan BUMDes. Penelitian keempat, dilakukan oleh Angesti Nindya Cahyaningrum (2021) mengenai *Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah* dengan menggunakan teori George Edwards III dan metode penelitian kualitatif. Implementasi pengembangan Desa Wisata Kalongan sebagai desa wisata rintisan yang dikelola oleh BUMDes dan Pokdarwis belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan seperti sumber daya manusia, infrastruktur, pandemi COVID-19, dan partisipasi investor. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan promosi dengan menyelenggarakan acara budaya sebagai langkah untuk meningkatkan sektor pariwisata di Desa Wisata Kalongan. Penelitian kelima dilakukan oleh Ahmad Hanif Nur R., Dyah Lituhayu, dan Titik Djumiarti (2022) tentang "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang pada Objek Wisata Palagan Ambarawa" menggunakan teori Van Meter & Van Horn (1975). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari belum adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam perkembangan pariwisata di Palagan Ambarawa, seperti perbedaan persepsi di kalangan pelaksana kebijakan, kekurangan tenaga kerja, keterbatasan anggaran, dan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Van Meter & Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa implementasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pengembangan Desa Wisata Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa (para pelaksana kebijakan) dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Kecamatan Kaligesing, Kepala Desa Somongari, Pengelola Desa Somongari (Ketua Pokdarwis dan Pegawai Pokdarwis), Pelaku Usaha di Kawasan Desa Wisata Somongari serta Wisatawan Pengunjung Desa Wisata Somongari. Informan pada penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* dan teknik *accidental sampling*. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan observasi nonpartisipan, teknik wawancara semiterstruktur, serta dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat Van Meter & Van Horn (1975) mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data Menurut Miles and Huberman yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni menggunakan pendapat Van Meter & Van Horn (1975) mengenai teori implementasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan bertujuan mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dan mencegah kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, pemerintah Kecamatan Kaligesing, serta pemerintah Desa Somongari telah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata. Namun, belum seluruh pelaksana memahami isi kebijakan tersebut. Untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Somongari sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019, diterbitkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/764/2022 tentang Penetapan dan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Purworejo Tahun 2022. Surat Keputusan ini mewajibkan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo melaporkan kegiatan pengembangan desa wisata setidaknya satu kali per tahun. Selain itu, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purworejo diminta memberikan dukungan dengan mengalokasikan sebagian kegiatan mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari mengikuti Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019, khususnya Pasal 14, yang menjelaskan pengembangan usaha pariwisata di desa wisata sebagai berikut:

a. Usaha Daya Tarik Wisata

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana kebijakan telah berhasil mengembangkan daya tarik wisata di Desa Somongari. Keberhasilan ini dibuktikan dengan masuknya Desa Wisata Somongari ke dalam kategori desa wisata berkembang menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Festival Budaya Jolenan Somongari juga meraih penghargaan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Desa Somongari meraih juara harapan 3 pada gelar desa wisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

b. Usaha Informasi Wisata

Pengembangan usaha informasi di Desa Somongari sudah berjalan baik dengan berbagai upaya promosi yang dilakukan. Namun, masih diperlukan pelatihan terkait informasi pariwisata melalui media sosial agar pengembangan desa wisata sesuai dengan era digital.

c. Usaha Atraksi Wisata

Pengembangan atraksi wisata di Desa Somongari sudah berjalan baik. Pemerintah desa dan masyarakat memahami bahwa budaya dan kesenian adalah potensi pariwisata yang besar. Pemerintah desa juga telah berkolaborasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo untuk pelaksanaan Festival Tribute to W.R. Soepratman dan Festival Budaya Jolenan Somongari.

d. Usaha Akomodasi Wisata dan Kuliner

Dapat diketahui bahwa pengembangan akomodasi jalan di Kecamatan Kaligesing masih kurang dan perlu ditingkatkan. Optimalisasi jalan dapat berdampak positif bagi masyarakat dan wisatawan, terutama mengingat potensi pariwisata di Kecamatan Kaligesing. Berdasarkan observasi, jaringan internet di Desa Somongari masih kurang baik. Menyikapi hal ini, Kepala Desa Somongari menyediakan akses internet gratis di sekitar kantor desa. Akses internet gratis seharusnya diperluas ke berbagai objek wisata, mengingat internet adalah kebutuhan utama masyarakat, terutama wisatawan.

e. Usaha Kerajinan Rakyat

Dalam upaya pengembangan usaha kerajinan rakyat masih diperlukan pengembangan lebih lanjut pada produk kerajinan rakyat atau cendera mata di Desa Wisata Somongari. Hal ini penting karena cendera mata berfungsi sebagai kenang-kenangan dan tanda bahwa seseorang telah melakukan kunjungan wisata, serta dapat meningkatkan ingkatan seseorang untuk kembali mengunjungi desa wisata.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata khususnya pasal 14 terkait pengembangan usaha pariwisata di desa wisata, sudah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan pada akomodasi jalan dan usaha kerajinan rakyat.

Secara umum ketercapaian pengembangan Desa Wisata Somongari sudah berjalan dengan baik dan sesuai harapan jika dilihat dari jumlah peningkatan jumlah wisatawan pada tahun 2023. Berikut adalah data pengunjung Desa Wisata Somongari tahun 2023:

Tabel 1.

Data Pengunjung Desa Somongari Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Pengunjung
2021	559
2022	1.134
2023	8.475

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2024

Jumlah total wisatawan Desa Somongari Tahun 2023 mencapai 8.475 orang. Berdasarkan data kunjungan per tahun, tahun 2023 merupakan tahun yang baik bagi Desa Wisata Somongari ditandai dengan peningkatan jumlah pengunjung desa jika dibandingkan dengan data 3 tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengunjung ini tentu memberikan dampak *multiplier effect* bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja di Desa Somongari.

3.2 Sumber Daya

Berdasarkan penelitian, sumber daya manusia di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo sudah baik, memiliki keahlian sesuai bidangnya, dan profesional dalam menjalankan tugas. Namun, sumber daya manusia di pokdarwis sebagai pelaksana di lapangan masih belum kompeten dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Selain itu, diperlukan komitmen kuat dari anggota pokdarwis untuk mengembangkan Desa Wisata Somongari agar tidak terjadi pergantian anggota setiap tahun.

Dari segi sumber daya finansial, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendukung pengembangan desa wisata dengan memberikan bantuan untuk kelestarian kesenian dan budaya lokal. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo perlu lebih serius mengalokasikan dana guna meningkatkan pembangunan desa wisata. Sementara itu, pemerintah Desa Somongari perlu mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan desa wisata. Mayoritas masyarakat Desa Wisata Somongari juga mendukung pengembangan desa wisata dengan memberikan kontribusi keuangan untuk menyukseskan kegiatan Festival Jolenan Somongari dan acara adat lainnya.

3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai agen pelaksana kebijakan, mencakup struktur birokrasi, norma, aturan, serta pola hubungan dalam birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari, termasuk Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Sekretaris Kecamatan Kaligesing, Kepala Desa Somongari, dan Ketua Pokdarwis Desa Somongari, semuanya memiliki komitmen kuat untuk bersinergi dalam mengembangkan Desa Wisata Somongari.

Para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen kuat dalam penyusunan hingga pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan mereka dalam penyusunan program Calender of Event Pariwisata Kabupaten Purworejo. Selain itu, masyarakat Desa Somongari menyadari bahwa pengembangan desa wisata memberikan dampak positif bagi mereka, sehingga mereka juga berkomitmen kuat mendukung kemajuan desa.

3.4 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi merupakan indikator penting dalam implementasi kebijakan, karena komunikasi yang baik antara organisasi dan individu terkait pelaksanaan kegiatan dapat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh intensitas komunikasi antar pelaksana kebijakan di setiap lini. Seringnya komunikasi dapat mengurangi risiko permasalahan dan miskomunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari, komunikasi antara dinas, pemerintah desa, dan pokdarwis berjalan dengan baik. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo berupaya membangun komunikasi dengan para pelaksana kebijakan dan stakeholder guna mencapai keberhasilan dalam pengembangan desa wisata Somongari. Komunikasi yang baik juga dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kaligesing dengan pemerintah desa dan pokdarwis Desa Somongari. Komunikasi yang baik ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai keberhasilan pengembangan Desa Wisata Somongari.

3.5 Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana dinilai dari pada respons atau tindakan yang diperlihatkan oleh para pelaksana kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari, yang bisa mencakup penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai keberhasilan kebijakan, diperlukan persamaan persepsi antar pelaksana kebijakan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterima oleh seluruh pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana kebijakan dibagi menjadi tiga bagian:

a. Respon Pelaksana Terhadap Implementasi Kebijakan

Pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Somongari, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo menunjukkan respon positif dengan memberikan dukungan terhadap segala kegiatan yang bertujuan mencapai keberhasilan kebijakan tersebut. Dukungan dari dinas dalam pengembangan desa wisata meliputi pelatihan kependamuan wisata, kuliner, digital marketing, pengelolaan homestay, dan manajemen desa wisata. Dinas juga membuat paket perjalanan wisata ke Desa Somongari serta meningkatkan promosi melalui sosial media dan brosur. Kolaborasi dengan pemerintah desa terlihat dari penyelenggaraan kegiatan seperti Festival Tribute to W.R Soepratman dan Festival Jolenan Somongari. Pemerintah Desa Somongari juga memberikan respons positif dengan mengalokasikan dana desa untuk berbagai kegiatan pengembangan desa wisata, didukung juga oleh sumbangan dana dari masyarakat.

b. Kemampuan Kognisi

Kemampuan kognisi memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan menunjukkan para implementor kebijakan telah memahami mekanisme pengembangan desa wisata. Para Pelaksana yang terdiri dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, pemerintahan Kecamatan Kaligesing, pemerintahan desa, dan pokdarwis Desa Somongari telah memahami Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata serta berbagai program dan kegiatan pengembangan desa wisata.

c. Intensitas Pelaksana Kebijakan

Preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo memiliki peranan paling penting. Dalam hal ini, kepala dinas berperan sebagai inisiator dan penggerak utama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari. Kepala dinas juga memahami bahwa kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari dapat memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan jumlah wisatawan, kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Dari ketiga indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana mendukung pengembangan desa wisata, memahami Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, serta memahami program dan kegiatan pengembangan Desa Wisata Somongari. Sementara itu, dapat terlihat bahwa Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam pengembangan desa wisata yang telah disepakati bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Purworejo. Merujuk pada indikator sikap pelaksana kebijakan, dapat diketahui bahwa semuanya menunjukkan respons yang positif. Hal ini diharapkan dapat terus dipertahankan agar pengembangan Desa Wisata Somongari dapat lebih efisien lagi.

3.6 Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kondisi lingkungan sekitar. Indikator ini mengukur sejauh mana dukungan lingkungan eksternal terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Somongari, karena keberhasilan sebuah kebijakan bergantung pada dukungan masyarakat sekitar.

a. Kondisi Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan pada kondisi sosial dimana masyarakat Desa Somongari mayoritas berprofesi sebagai buruh tani dan petani. Selain itu, masyarakat setempat masih menjaga kearifan, budaya dan kesenian lokal. Maka dari itu, pengembangan desa wisata ini dapat dikatakan sesuai dengan profesi maupun nilai-nilai adat istiadat yang ada di Desa Somongari.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi masyarakat Desa Somongari masih di kategorikan menengah kebawah. Namun, pengembangan Desa Wisata Somongari diyakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hal ini telah menyadarkan masyarakat desa akan dampak positif dari pengembangan desa wisata, sehingga mereka turut serta dalam proses pengembangan ini.

c. Kondisi Politik

Pada lingkungan politik ini peneliti melihat bahwa kondisi politik dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengembangan desa wisata. Hal ini dilakukan oleh Bupati Kabupaten Purworejo yang menanggapi Perda Nomor 15 tahun 2019 tentang Desa Wisata dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/764/ 2022 tentang Penetapan dan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Purworejo Tahun 2022. Bupati memerintahkan dinas terkait dan desa yang ada dalam SK tersebut untuk mengembangkan dan membangun pariwisata yang berdaya saing dan memiliki nilai jual sehingga dapat menyejahterakan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa unsur politik vital daerah meliputi Bupati dan DPRD Kabupaten Purworejo sangat mendukung pengembangan Desa Wisata Somongari. Pemerintah Kabupaten Purworejo juga mengikutsertakan Desa Somongari dalam Gelar Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 yang berhasil meraih juara harapan 3. Dukungan pengembangan desa wisata tidak hanya dari pemerintah kabupaten tetapi juga datang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan bantuan langsung sebesar 100 juta pada tahun 2021 dan 50 juta di tahun 2023, untuk pengembangan Desa Wisata Somongari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dikatakan berhasil dan tidak memiliki kendala dalam upaya pengembangan Desa Wisata Somongari.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Penulis menemukan temuan penting yakni proses implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini dibuktikan dengan tercapainya pengembangan daya tarik wisata di Desa Somongari dengan tercatatnya Desa Somongari ke dalam kategori desa wisata berkembang menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Festival Budaya Jolenan Somongari juga meraih penghargaan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Desa Somongari meraih juara harapan 3 pada gelar desa wisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan Eduardus Hirodias, Hermawan, dan Fadillah Amin(2022) bahwa proses implementasi tidak berjalan optimal dan tidak mencapai tujuan akhir kebijakan ini. Tujuan akhir tersebut adalah menciptakan daya tarik wisata budaya yang berkualitas dari segi destinasi dan jumlah wisatawan, sehingga mampu menjadi daya tarik wisata tambahan yang mendukung daya tarik utama yaitu Komodo.

Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari masih beberapa kendala, diantaranya sumber daya manusia yang dimiliki pokdarwis

somongari masih belum kompeten dan berkomitmen dalam pengembangan Desa Wisata Somongari sama halnya dengan temuan Nurul Maulidiah dan Suci Megawati (2022). Selanjutnya dalam pengembangan Desa Wisata Somongari masih belum optimalnya penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur maupun masih minimnya dukungan sumber dana. Artinya para pelaksana kebijakan harus lebih serius mengalokasikan dana guna meningkatkan pembangunan desa wisata. Pengembangan Desa Somongari diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan sehingga memberikan dampak *multiplier effect* bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja di Desa Somongari.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat kurangnya pemahaman pelaksana terhadap isi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, sumber daya pokdarwis yang belum memadai dan kompeten, serta belum optimalnya pengelolaan dana desa dan masih minimnya dukungan anggaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari berdasarkan teori Van Meter & Van Horn (1975) secara umum sudah baik, namun masih perlu peningkatan. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, sumber daya pokdarwis yang belum memadai dan kompeten, serta pengelolaan dana desa yang belum optimal dan minimnya dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas penunjang. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah komitmen yang baik antar pelaksana kebijakan, komunikasi yang efektif, dan tingginya kesadaran masyarakat Desa Somongari terkait pengembangan desa wisata. Sebaliknya, faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari yakni kurangnya pemahaman pelaksana terhadap isi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, sumber daya pokdarwis yang belum memadai dan kompeten, serta belum optimalnya pengelolaan dana desa dan masih minimnya dukungan anggaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, perbaikan struktur dan birokrasi antara pengelola wisata dan pokdarwis, memilih anggota pokdarwis yang berkomitmen dalam pengembangan desa wisata, memberikan pelatihan dan pembekalan terkait Teknologi Informasi (IT), melakukan promosi untuk menarik investor guna pembangunan fasilitas penunjang, dan mengadakan Gelar Pokdarwis Kabupaten Purworejo.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Van Meter & Van Horn (1975) mengenai teori implementasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo beserta jajarannya, Camat Kaligesing beserta jajarannya, Kepala Desa Somongari beserta jajarannya, Pokdarwis Desa Somongari serta tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Somongari yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Cahyaningrum, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Gartiwi, M. M., Irawati, R. I., & Karlina, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran. *Responsive*, 5(2), 69. <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i2.41126>
<https://potensiinvestasi.purworejakab.go.id/potensi-sektor-perkebunanbuah/>
Accessed: 2024-04-2
<https://www.instagram.com/wisatasomongari/> Accessed: 2024-04-02
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Kemenparekraf. (2022). *Siaran Pers: Menparekraf: Tahun 2022 Titik Tolak Kebangkitan Sektor Parekraf Nasional*.
<https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-tahun-2022-titik-tolak-kebangkitan-sektor-parekraf-nasional>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Publika*, 10(2), 391–406.
- Miftachul, C. U. S. & M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *CV. Nata Karya* (Vol. 53, Issue 9).
[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Moleong, L. . (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata Purwanto, H. (2022, February 18). *Desa Wisata Somongari*. Kemenparekraf.Go.Id.
- R, Ahmad Hanif Nur, Dyah Lituhayu, T. D. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Semarang Pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1–16.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/36180/27794>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penetapan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Purworejo

